

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad dkk. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anwar, Syarifudin. 2003. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- Eeng Ahman dan Epi Indriani. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria: Isi dan Pelaksanannya. Jakarta: Djambatan.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama. Depok: Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasapoetra, G. 1992. Masalah Pertanahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2007. Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pembiayaan Bangunan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba. 2016. *The Shufting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujiyati dan M. Abdul Aris. 2021. Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju UU Cipta Kerja). Muhammadiyah University Press.
- Murtopo, Wisnu dkk. 2024. Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Sertifikat Hijau. Indramayu: Penerbit Adab.
- Richard A.M. dan Peggu B.M. 1989. Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw Hill.
- Sahnan. 2016. Hukum Agraria Indonesia. Malang: Setara Press.
- Santoso, Agus. 2012. Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sipayung, Parlin Dony dkk. 2025. Perikatan Dalam Hukum Perdata. Jambi: Nawala Gama Education.
- Soemitro, Rochmat. 1979. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria SW. 2021. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suriani, Rollys, dkk. 2025. Penganatar Ilmu hukum. Yogyakarta: Star Digital Publishing.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

UNMUL, FH. *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum: Klasifikasi Hukum*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Zeda, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Jurnal

Dewi, Dyah A.S. “Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* Vol. 4 No. 2.

Fitria Nur A. R. dkk., “Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”, *Jurnal Staatsrecht Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (Juni 2023). Hlm.139-165.

Mario Julyano dan Aditya Yuli S. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido* Vol. 1 No. 1 (Juli 2019).

Purnomo, Heru, “Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* Vol. 1, No. 1 (Maret 2022). Hlm. 71-92.

Taufik, Muhammad, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Mukkadimah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 19 No. 1 Tahun 2013.

Yashinta dkk., “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materiil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh”, *Jurnal Intelektiva* Vol. 4 No. 10 (Juni 2023). Hlm. 51-56.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 115.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.

c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

D. Internet

Conversation, The, “Penggunaan ‘Sultan Ground’ Oleh Rakyat: Perlu Dialog Agar Lebih Istimewa”, [16-07-2024],

(<https://theconversation.com/penggunaan-sultan-ground-oleh-rakyat-perlu-dialog-agar-lebih-istimewa-232504>), [23-05-2025]

Eriton, Muhammad, “Sistem Civil Law”, (<http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>), [07-04-2021]

Ferdian, Teddy, “Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?”, (<https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>), [19-03-2024].

Hukumonline, “Perbedaan Pajak dan 5 Pungutan Resmi Lainnya”, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pajak-dan-pungutan-resmi-lainnya-1t65feb80747e67/>), [17-01-2025].

Jabar, Bapenda, “Retribusi Daerah, (<https://bapenda.jabarprov.go.id/retribusi-daerah/>).

Kominfodiy, “Pisungsung: Rumus dan Simulasi Perhitungan”, https://www.instagram.com/p/DCEFznnycOe/?img_index=1&igsh=MW1iNng0OHA3MzNrbA==, [07-11-2024].

Mustafida, Latifa, “Cara Mengurus Perpanjangan HGB Tanah Kasultanan”, <https://www.latifamustafida.com/2023/12/cara-mengurus-perpanjangan-hgb-tanah.html>, [12-12-2023]

NISP, Redaksi OCBC, “Retribusi: Pengertian, Contoh dan Bedanya dari Pajak Daerah”. (<https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/retribusi-adalah>), [11-03-2022].

Putra, Dani, “Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan di Indonesia, (<https://ivaa-online.org/program/keberadaansultanground/>), [07-04-2015].

V-tax, “Sistem Retribusi Jasa Usaha”, <https://www.v-tax.id/produk-3-2-sistem-retribusi-jasa-usaha.html>.

E. Skripsi dan Tesis

Niken, Theresia, 2017, “Tinjauan Yuridis Tanah Kasultanan Terkait Tanah Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pangestu, Robby, 2023, “Pengecualian Pengenaan BPHTB pada Peralihan Tanah Negara Menjadi Tanah Kasultanan Ditinjau dari Prinsip Ekuitas”, Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Harmoni, Margareta T., 2024, “Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan Tanah Kasultanan Yogyakarta”, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotaariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.